



KR-Said Masykuri

Ribuan ikan karamba di WKO yang ditemukan sudah mati akibat fenomena upwelling.

Muslimah Pengusaha Agar Kuasai Literasi Digital

JAKARTA (KR) - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan para muslimah pengusaha tentang pentingnya penguasaan literasi digital dalam pengembangan usahanya.

Pesan ini disampaikan Wamenag pada Workshop Muslimah Entrepreneur secara daring, mengangkat tema "Meningkatkan Kapasitas Entrepreneur di Kalangan Muslimah Sebagai Kontribusi Nyata Membangun Umat dan Bangsa" di Jakarta, Senin (30/8). "Muslimah pengusaha wajib menguasai literasi digital. Sudah bukan zamannya lagi menjalankan bisnis secara manual. Itu sudah ketinggalan zaman. Semua orang kini sudah beralih dari manual ke digital," pesan Wamenag.

Dikatakan, jangan berpikir bahwa digital

itu mahal dan susah. "Semua kita bisa dan biasa menggunakannya. Gadget yang ada di tangan kita adalah modal penting membangun usaha," sambungnya.

Wamenag minta gadget tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi semata. Apalagi, hanya digunakan untuk sekadar bermain game yang menghabiskan waktu. Gadget bisa dioptimalkan sebagai modal merintis dan membangun usaha digital.

"Sangat sederhana, cobalah mulai memposting dan mengendorse produk kita melalui status di media sosial. Mari gunakan media sosial untuk aktivitas produktif dan menguntungkan dengan memanfaatkan bagi kemajuan bisnis kita," sambungnya.

(Ati)-d

Solo

Sambungan hal 1

Presiden Jokowi merinci, untuk PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali menurun dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota. PP-KM Level 3 dari 67 kabupaten/kota menjadi 76 kabupaten/kota, Level 2 dari 10 kabupaten/kota menjadi 27 kabupaten/kota.

Untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali juga terjadi perbaikan PPKM Level 4 yaitu dari tujuh provinsi menjadi empat provinsi. Selanjutnya daerah yang menerapkan Level 4 dari 104 kabupaten/kota berkurang menjadi 85 kabupaten/kota; Level 3 dari 234 kabupaten/kota menjadi 232 kabupaten/kota. dan

PPKM Level 2 dari 48 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota; kemudian PPKM Level 1 dari tidak ada kabupaten/kota menjadi satu kabupaten/kota.

"Hasil evaluasi juga menunjukkan penerapan protokol kesehatan di beberapa sektor sudah menunjukkan hal cukup baik," tambah Presiden.

Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap penerapan di masing-masing level PPKM yang akan dijelaskan lebih rinci oleh menteri koordinator dan menteri-menteri terkait.

(Ant)-d

Pancasila

Sambungan hal 1

PP Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro. Pidato ini diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yakni Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Menurut Haidar, pikiran-pikiran nasionalisme yang radikal-ekstrem (ultranasionalisme, chauvinisme), keagamaan yang radikal-ekstrem (cita-cita negara agama atau teokrasi, fundamentalisme agama), multikulturalisme radikal-ekstrem (paham demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme dan toleransi liberal-sekular), sosial demokrasi dan segala ideologi radikal-elstrem lainnya seperti komunisme dan liberalisme-sekularisme tidak sejalan dengan Pancasila yang berwatak-dasar moderat. Jika ingin menjalankan Pancasila yang moderat, strategi membangun dan mengembangkan pemikiran keindonesiaan pun semestinya menempuh jalan moderat atau moderasi, bukan melalui pendekatan kontra-radikal atau deradikalisasi yang ekstrem.

"Kontroversial seputar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Survei Lingkungan Belajar (SLB), lomba pidato tentang hukum menghormati bendera dan pemikiran-pemikiran pro-kontra lainnya mesti dihindari jika ingin meletakkan Pancasila bersama tiga pilar lainnya yaitu NKRI, UUD 1945 dan Kebhinnekaan sebagai ideologi jalan tengah yang moderat," ujarnya. Menurut Haedar, segala paham radikal-ekstrem tidaklah sejalan dengan Pancasila. Menghadapi paham radikal-ekstrem pun tidak semestinya dengan cara yang radikal-esktrm. "Selain akan

melahirkan radikal-ekstrem baru pada saat yang sama bertentangan dengan jiwa Pancasila," tambahnya.

Amandemen

Tumbuh kembalinya gagasan amandemen UUD 1945, seyogianya dipikirkan dengan hikmah-kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik. Belajarlah dari empat kali amandemen di awal reformasi, yang mengandung sejumlah kebaikan, tetapi menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli. Jangan sampai di balik gagasan amandemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998. "Lebih krusial lagi, bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam," tandas Ketum PP Muhammadiyah ini.

Di sinilah, lanjutnya, pentingnya 'hikmah kebijaksanaan' para elite negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman. Indonesia yang bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Mr Soepomo, Indonesia yang 'bernyawa'. Itulah, sebut Haedar, Indonesia Jalan Tengah dan Indonesia Milik Bersama.

Haedar menyebutkan, jalan masih panjang dan terjal menuju Indonesia yang diidamkan itu. "Keragaman pandangan dan segala bentuk pengelompokan tidak semestinya membuat Indonesia retak dan terpecah-belah," ujarnya, seraya meyakini dan percaya masih banyak elite dan warga bangsa yang berhati tulus, baik, jujur dan terpercaya dalam berbangsa dan bernegara.

(Fsy)-d

DIDUGA AKIBAT FENOMENA 'UPWELLING'

Puluhan Ton Ikan Karamba WKO Mati

SRAGEN (KR) - Ribuan ekor setara puluhan ton ikan berbagai jenis yang dibudidayakan petani di Waduk Kedung Ombo (WKO) di wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen mendadak mati mengambang. Akibat kejadian itu, petani karamba WKO utamanya di Dukuh Ngasinan dan Boyolayar Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang, menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Diduga ribuan ikan mati mendadak itu akibat fenomena *upwelling*. Sukiyo (28) petani karamba asal Dukuh Nonggorejo RT 30 Desa Ngargosari mengatakan, wabah *upwelling* itu terjadi sejak Senin (30/8) dini hari. "Banyak ikan di karamba mendadak mati, dengan gejala lemas dan mengambang di permukaan," jelasnya, Senin kemarin.

Menurutnya, gejala *upwelling* antara lain ditandai air keruh. Airnya sangat bau dari dasar waduk dan naik ke atas itu sejak sekitar pukul 02.00 WIB.

Kemudian banyak ikan karamba sudah mati. "Upwelling adalah fenomena air waduk yang lebih dingin dan bermassa lebih besar yang bergerak dari dasar air ke permukaan air akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena itu mengangkat sisa-sisa pakan dan kotoran dari dasar yang beracun dan membuat ikan akhirnya mati," jelas Sukiyo.

Ia menyebut ada puluhan petani karamba WKO di wilayahnya yang terdampak fenomena tersebut. Namun ia

belum bisa menyebutkan jumlah pasti ikan yang mati mendadak. Hanya diperkirakan sudah puluhan ton ikan siap panen mati akibat terkena dampak *upwelling*. Ikan yang mati mendadak itu terdiri nila, tombro dan lainnya. "Di wilayah ini ada sekitar 30 petani karamba," ungkapnya.

Dengan harga di kisaran Rp 25.000 sampai Rp 35.000 perkilogram, kerugian yang diderita petani ditaksir mencapai ratusan juta. Sukiyo menyebut sejumlah petani besar mengalami kerugian lebih banyak. "Kalau kawasan kemarian ikan merata di wilayah Ngasinan Kidul Boyolayar terkena semua. Hingga saat ini yang bisa kami lakukan adalah menggesser karamba-karamba kami ke tempat air yang lebih jernih, ditarik menggunakan kapal mesin," kata Sukiyo.

(Sam)-d

Waket KPK

terbukti melakukan dua perbuatan, yaitu pertama, menyalahgunakan pengaruh selaku insan KPK untuk kepentingan pribadi dan kedua, berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP No 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK Pasal 3 ayat 1 huruf (a) disebutkan Wakil Ketua KPK mendapat gaji pokok sebesar Rp 4,6 juta.

Artinya gaji pokok Lili dipotong 40 persen dari Rp 4,6 juta, yaitu sebesar Rp 1,8 juta. Namun, kata majelis etik, Lili masih mendapatkan tunjangan-tunjangan lain yang diatur di Pasal 3 dan 4, yaitu tunjangan jabatan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 20,4 juta, tunjangan kehormatan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 2,1 juta. Tunjangan perumahan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 34,9 juta, tunjangan transportasi Wakil Ketua KPK seju-

lah Rp 27,3 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Wakil Ketua KPK sebesar Rp 16,3 juta dan tunjangan hari tua Wakil Ketua KPK sebesar Rp 6,8 juta, sehingga Lili masih mendapatkan *take home pay* sekitar Rp 110,7 juta.

Majelis etik dalam pertimbangannya menjelaskan, Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas KPK No 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yaitu "menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi".

Sehungan hal itu, kata majelis etik, Lili dinilai terbukti menggunakan kewenangannya sebagai pimpinan KPK kepada Walikota Tanjungbalai M Syahril agar membayar uang jasa pengabdian mantan Plt Direktur PDAM Tirta Kualo Ruri Prihatini yang merupakan saudara Lili.

Lili menyarankan Ruri Prihatini untuk

Sambungan hal 1

mengirim surat ke Direktur PDAM Tirta Kualo dan surat juga ditembuskan ke KPK, sehingga Ruri mendapatkan pembayaran uang pengabdian secara bertahap senilai total Rp 53.334.640.

Selanjutnya Lili juga terbukti melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a yaitu "mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung".

Terkait hal itu, menurut majelis etik, Lili pada Juli 2020 menghubungi Syahril melalui telepon. Selain itu, Lili juga merekomendasikan seorang pengacara bernama Arief Aceh seorang pengacara di Medan dengan memberikan nomor teleponnya dan Lili juga tidak menceritakan komunikasinya dengan Syahril kepada pimpinan KPK lainnya.

(Ful)-d

9 Tahun

Sambungan hal 1

Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK) disahkan. Keistimewaan Yogya itu sendiri telah mengalami guncangan, cobaan, dan rupa-rupa tantangan. Di era Orde Lama, DIY dan DI Aceh nyaris dihapuskan karena Presiden Soeharto kala itu menghendaki penyeragaman semua pemerintahan daerah di Indonesia. Di era kekuasaan Presiden SBY, RUUK lamban disahkan karena Keistimewaan DIY dianggap tak cocok dengan demokrasi. Keistimewaan Yogya juga melewati rupa-rupa badai bencana, dari gempa dahsyat 2006, erupsi Merapi, hingga pandemi Covid-19 yang belum reda hingga sekarang.

Pandemi berkepanjangan yang memerosotkan semua sektor kehidupan mengingatkan kita bahwa Keistimewaan Yogya harus *migunani tumrapping* rakyat. UUK sendiri menegaskan bahwa tujuan Keistimewaan DIY adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan harmoni (ke-bhinneka-tunggal-ika-an) masyarakat Yogya (Pasal 5 ayat 1). Itulah ukuran keberhasilan implementasi Keistimewaan DIY.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera-tenteram-harmoni itu, harus ada konvergensi antara tiga unsur penting Keistimewaan Yogya yaitu pemimpin, kraton, dan kaprajan (pemerintah). Pemimpin Keistimewaan DIY adalah Sultan dan Paku Alam yang bertahta yang ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kraton adalah Kasultanan dan Pakualaman yang mempunyai peran dan tanggungjawab untuk menyediakan dan mendukung pemimpin (Sultan dan Paku Alam) serta tugas khusus untuk membangun masyarakat Yogya melalui jalur/bidang kebudayaan (UUK Pasal 5 ayat 1). Pemerintah Daerah DIY adalah untuk unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah (UUK Pasal 1).

Ketiganya (pemimpin-kraton-kaprajan) itu harus sama-sama berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat. Komitmen Sultan sudah ditegaskan oleh HB IX yaitu étahta untuk rakyati dan oleh Sultan HB X yaitu étahta untuk kesejahteraan rakyati (pidato jumenengan 1989). Komitmen Kraton untuk kesejahteraan rakyat sudah nyata, salah satunya melalui kebijakan terkait Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) untuk kesejahteraan rakyat. Adapun komitmen Pemda DIY adalah tuntutan mendasar sebagai abdi masyarakat.

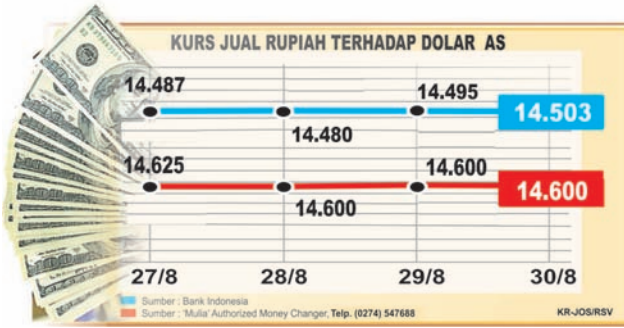
Ketiganya harus kompak dan solid sehingga bisa

berkonvergensi, yaitu bekerja sama intens untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam hal soliditas inilah sejarah mencatat bagaimana penjajah (kolonialis) selalu memecah belah, Kraton diguncang, dipecahbelah, diadudomba. Energi kraton terkuras karena konflik internal berlarut-larut.

Penjajah Belanda penuh strategi licik untuk merusak soliditas antara Sultan (raja) dengan pemerintahan yang dipimpinnya. Belanda memaksakan kontrak politik kepada Raden Mas Dorodjatun menjelang naik tahta menjadi Sultan HB IX pada 1940 yang isinya (1) memaksa supaya Patih (Pepatih Dalem) harus punya dwi-kesetiaan. Karena di satu sisi ia pegawai pemerintah Hindia-Belanda dan di sisi lain ia pegawai Kasultanan. (2) Komposisi Dewan Penasihat Sultan separuh diusulkan Gubernur Belanda dan separuh lagi oleh Sultan, (3) Prajurit Kraton harus menjadi bagian dari Tentara Kerajaan Hindia-Belanda (Atmakusumah, 1982). Di zaman pendudukan Jepang, HB IX menghilangkan kekuasaan Patih itu, diganti dengan tim pendukung Sultan yang dinamakan Paniradya yang dipimpin langsung oleh HB IX (Sujata, 1988). Dengan begitu, Sultan dan pemerintahannya sangat solid.

Hari ini, Yogya tidak lagi berperang melawan Belanda atau Jepang. Penjajah-penjajah rakyat sekarang adalah pandemi, kemiskinan, korupsi dan ancaman krisis ekonomi, juga ancaman bencana alam. Namun peperangan kita hari ini tidak lebih mudah, sehingga kita mutlak harus bersatu padu. Kesatuan raja dan rakyat sudah tidak diragukan lagi, *manunggaling kawulo lan gusti*. Yang harus diperkuat sekarang adalah konvergensi pemimpin-kraton-kaprajan untuk bersama mewujudkan masyarakat DIY yang sejahtera-tenteram-harmoni.

(Penulis adalah pakar Keistimewaan Yogya)-d



Mengajari Si Kecil Cara Mencintai Kekurangan Diri Sendiri Melalui Film Animasi "Luca"



Rivga Agusta, S.J.P., M.A.

Dosen dan Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta)

PERPANJANGAN masa PPKM menuntut masyarakat untuk bisa berkegiatan di dalam rumah. Meskipun hanya di rumah saja, banyak aktivitas menyenangkan dan positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu bersama si kecil lho. Salah satunya adalah menonton film animasi bersama. Lho, apa spesialnya menonton film animasi bersama? Bukannya malah membuat anak menjadi malas dan nonton layar TV terus? Nah, supaya tidak salah pemahaman, menonton film bersama di sini tidak sekedar hanya melakukan aktivitas menyaksikan tayangan film di layar TV atau gadget saja, tetapi orang tua melakukan pendampingan selama

aktivitas menonton tersebut. Pendampingan saat menonton film animasi bersama si kecil tidak hanya bermanfaat untuk menjalin quality time dengan keluarga, tetapi juga proses belajar bagi si kecil. Film animasi tentunya menjadi salah satu tayangan yang menarik bagi anak-anak, maka ketika si kecil menikmati proses menonton tayangan yang ia sukai tersebut, saatnya orang tua menyisipkan nilai-nilai pembelajaran yang bisa diambil dari tayangan film animasi tersebut. Salah satu film animasi yang menarik dan sarat akan nilai sosial yang bisa dipelajari adalah film animasi "Luca".

Film animasi "Luca" adalah film kerja sama antara Disney dan Pixar. Film ini mulai tayang pada 18 Juni 2021 di layanan streaming Disney+ Hotstar. Di awal penayangannya, film ini mendapat respon dan review positif dari para penontonya. Film animasi "Luca" menceritakan tentang monster laut anak laki-laki yang ingin pergi berpetualang di darat. Luca, monster laut anak-anak tersebut, dapat berubah fisiknya menjadi seorang manusia apabila dia berada di daratan. Fisiknya akan

berubah menjadi monster laut lagi, apabila ia masuk ke dalam laut atau terkena air.

Diceritakan dalam film tersebut, Luca dan sahabatnya, Alberto, pergi ke daratan untuk dapat mengikuti kompetisi dengan anak-anak di kota untuk bisa mendapatkan hadiah uang. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli vespa yang sangat diidamkan oleh Luca dan Alberto. Vespa ini nantinya akan digunakan Luca dan Alberto untuk pergi bertualang dan mengelilingi dunia. Sehingga Luca dan Alberto sungguh-sungguh berusaha untuk dapat memenangkan kompetisi dan menjaga diri mereka agar tidak berubah menjadi monster air yang dibenci dan ditakuti orang-orang di kota. Sepanjang film menunjukkan dinamika permasalahan yang dialami Luca hingga dia harus selalu berusaha menutupi fisiknya sebagai monster laut setiap kali terkena air di daratan. Di pertengahan cerita, teman manusia mereka bernama Giulia, mengetahui rahasia mereka yang merupakan monster air. Namun demikian, Giulia yang sudah cukup berteman dengan Luca dan Alberto sama sekali tidak membenci mereka dan justru membantu mereka untuk bisa menang



kompetisi bersama.

Latar sosial kota dimana cerita ini berlangsung menggambarkan bahwa masyarakat di daerah tersebut anti dan takut dengan monster laut. Sehingga Luca harus bisa menutupi dirinya apabila dia tiba-tiba berubah menjadi monster laut ketika berinteraksi dengan orang-orang di kota tersebut. Tentu hal ini menjadi salah satu konflik yang dialami Luca untuk dapat hidup dan bertualang di daratan. Latar sosial ini secara tidak langsung merepresentasikan apa yang biasa terjadi di masyarakat umum dan bahkan di lingkungan kita sendiri. Masyarakat sulit menerima seseorang yang 'berbeda' dan memiliki kekurangan fisik. Seseorang yang berbeda dan memiliki kekurangan fisik, cenderung akan menutupi kekurangan tersebut agar dapat diterima dengan baik dan tidak dinilai buruk oleh masyarakat. Sepanjang film menceritakan bagaimana

usaha Luca untuk menutupi identitasnya, hingga pada akhirnya Luca harus berani menunjukkan siapa dirinya di hadapan masyarakat di kota demi menolong sahabatnya yang mengalami kesulitan di tengah turunnya hujan. Luca juga harus merelakan kesempatannya untuk bisa memenangkan sebuah hadiah vespa yang benar-benar ia inginkan. Sempat dirundung rasa ketakutan masyarakat akan menyerang Luca yang berwujud monster air, namun di akhir cerita ayah Giulia yang merupakan pemimpin dari kelompok penangkap monster air justru dengan besar hati menunjukkan penerimaannya kepada Luca dan Alberto. Sikap yang diambil ayah Giulia di sini menunjukkan bagaimana dirinya menerima Luca dan Alberto karena dia cukup mengenal sifat dari Luca dan Alberto yang sempat tinggal bersama dengan ayah Giulia. Dari sikap ayah Giulia dan Giulia yang benar-benar menerima Luca dan Alberto menunjukkan bahwa bagaimanapun fisik Luca dan Alberto, mereka tetap menyadari bahwa hal terpenting dari diri seseorang adalah hati dan sifatnya. Kisah Luca memang merupakan kisah

sederhana yang dibalut dengan imajinasi fiksional, namun kisah ini bisa menjadi sangat berarti apabila orang tua bisa turut menjelaskan makna sesungguhnya dari kisah tersebut kepada anak. Usai menonton film tersebut, orang tua bisa kembali membicarakan kisahnya bersama si kecil dengan cara bertanya kepada si kecil apakah ia menyukai cerita Luca dan bagian/adekan apa yang si kecil ingat dan sukai dari cerita Luca. Orang tua juga bisa menanyakan hal baik dan hal buruk apa yang si kecil bisa tangkap dari film tersebut. Dari pertanyaan tersebut, orang tua dapat secara perlahan mengulas kembali kisah Luca dan menjelaskan nilai-nilai sosial yang dapat dipelajari. Nilai utama yang dapat dijelaskan adalah meskipun Luca adalah monster laut dan ia selalu menutupi identitas yang menurutnya adalah sebuah "kekurangan", tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari hal itu. Hal terpenting dalam diri seseorang bukan hanya sekedar fisik yang terlihat oleh mata, tetapi sifat dan hati orang tersebut. (*)